

SEKILAS TENTANG PENYUSUNAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN¹

Oleh : Pudji Muljono²

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.

Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.

Paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Paradigma tersebut bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang didasarkan paradigma baru tersebut, diperlukan acuan dasar bagi setiap satuan pendidikan yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman untuk proses pembelajaran yang bersifat demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis.

¹ Disarikan dari draft Naskah Standar Proses Pembelajaran

² Supporting staff BSNP untuk Tim Standar Proses Pembelajaran

Dengan mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik sebagai masukan dalam sistem pembelajaran, dan di sisi lain ada tuntutan agar proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, maka proses pembelajaran harus dipilih, dikembangkan, dan diterapkan secara luwes dan bervariasi dengan memenuhi kriteria standar. Secara konseptual proses pembelajaran yang bersifat luwes dan bervariasi perlu diterapkan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pembelajaran pada setiap satuan pendidikan harus interaktif, inspiratif dalam suasana yang menyenangkan, menggairahkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Untuk itu diperlukan adanya acuan dasar yang memuat kriteria minimal berbagai aspek penyelenggaraan proses pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pada tahap awal acuan dasar baru meliputi jalur pendidikan formal.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dirumuskan dan ditetapkannya standar proses pembelajaran adalah untuk menjamin mutu proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan formal, sehingga terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Adapun manfaat standar proses pembelajaran adalah untuk dijadikan:

- 1) Pedoman umum bagi para pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran di setiap satuan pendidikan formal.
- 2) Dasar bagi pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan formal.
- 3) Petunjuk bagi masyarakat dalam peran sertanya dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program pembelajaran di setiap satuan pendidikan formal.

B. Landasan Penyusunan Standar Proses Pembelajaran

1. Landasan Yuridis

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian pembelajaran dalam UU Sisdiknas tersebut adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bab IX UU Sisdiknas mengatur tentang perlunya ditentukan standar nasional pendidikan. Standar nasional tersebut terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam UU Sisdiknas. Dalam Bab I Ketentuan Umum SNP yang dimaksudkan dengan standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tujuan standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dalam Bab IV Pasal 19 ayat (1) SNP ditentukan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses pembelajaran ditentukan pula agar pendidik memberikan keteladanan.

2. Landasan Konseptual

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, sejak tahun 1920an telah mengumandangkan pemikiran bahwa pendidikan pada dasarnya adalah memanusiakan manusia. Untuk itu suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Dengan demikian pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, serta menjadi anggota masyarakat yang berguna. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Metode pendidikan yang paling tepat adalah sistem among yaitu metode pengajaran yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh. Sementara itu prinsip penyelenggaraan pendidikan perlu didasarkan pada "*Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*" (Tilaar, 2002).

Sejak awal sejarah perkembangan pendidikan, sebenarnya telah banyak pendapat dan cara yang dilakukan agar belajar dan mengajar dapat berlangsung dengan efektif. Pendapat dan cara mengajar tersebut dikenal dengan istilah didaktik dan metodik atau metode pengajaran. Socrates (469-399 SM) sebagai seorang sufi di Athena telah menekankan perlunya metode dialogis dengan memberikan pertanyaan yang tajam, agar peserta didik mampu membangun konsep. Selanjutnya Aristoteles (384-322 SM) lebih mengutamakan metode induktif berdasarkan pengalaman agar semua peserta didik mampu membangun pengetahuan sendiri (Thompson, 1962; Ornstein, 1981).

Jan Komensky, atau lebih dikenal dengan nama Johann Amos Comenius (1592-1670), telah menerapkan pendapatnya bahwa program pembelajaran harus bertolak dari alam sekitar, dan untuk itu diperlukan peragaan visual dan taktik dalam proses pembelajaran. Comenius juga dikenal sebagai pendidik pertama yang mengembangkan penggunaan gambar (ilustrasi) dalam buku pelajaran (Heinich, Molenda and Russell, 1989). Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) menekankan perlunya perombakan sistem pembelajaran di sekolah yang menekankan pada hafalan dan ingatan. Apa yang

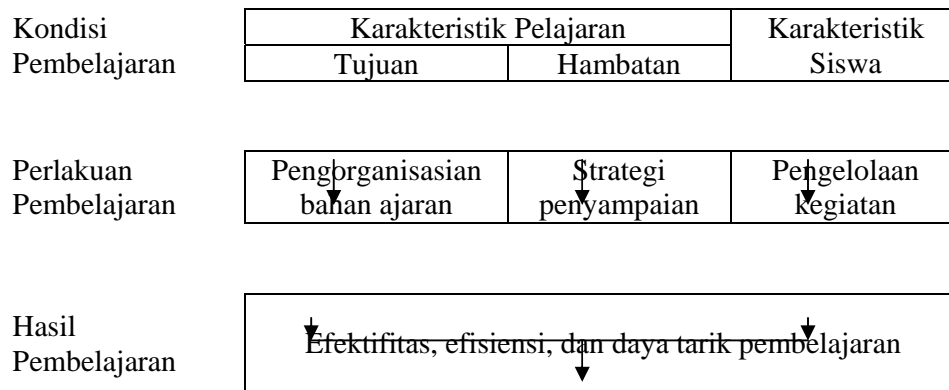
dilakukannya adalah bahwa pembelajaran harus mengikuti perkembangan alamiah, yaitu dari konkret ke abstrak, dari lingkungan dekat ke yang jauh, dari yang mudah ke sukar, dan secara gradual ke kumulatif (Thompson, 1962; Ornstein, 1981).

Friedrich Froebel (1782-1852) yang dikenal sebagai bapak Taman Kanak-kanak, menekankan pada perlunya metode ekspresi motorik dan aktivitas diri pada anak-anak. Karena itu pada awal anak memasuki dunia pendidikan, perlu diciptakan dan dikelola lingkungan yang sesuai untuk anak-anak agar mereka mampu bermain, menyanyi, menggambar, berkarya, dan sebagainya. Pendidikan harus berlangsung dengan memperhatikan harga diri peserta didik, serta dengan memberikan keteladanan mengenai nilai-nilai luhur yang perlu dijunjung. Semua itu bermuara pada tujuan moral, sosial dan pendidikan (Thompson, 1962; Ornstein, 1981). John Dewey (1857-1952) yang dikenal sebagai bapak pendidikan di Amerika Serikat berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan kontribusi dalam perkembangan pribadi dan sosial seseorang, melalui pengalaman dan pemecahan masalah yang berlangsung secara reflektif. Untuk itu metode pengajaran di sekolah perlu dikembangkan dengan permainan, konstruksi, kontak langsung dengan alam, dan penggunaan sarana untuk ekspresi dan aktivitas diri peserta didik; sebagai dasar tumbuhnya sifat demokratis di antara mereka (Dewey, 1964).

Tuntutan untuk melakukan pembaharuan yang sesuai dengan harkat peserta didik sebagai pribadi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah melahirkan suatu cabang disiplin keilmuan yang relatif baru dan semula dikenal sebagai didaktik dan metodik menjadi teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber untuk keperluan belajar (Seels dan Richey, 1994).

Dalam bidang teknologi pembelajaran telah dikembangkan sejumlah teori dan praktik pembelajaran yang bersifat preskriptif, misalnya teori pembelajaran elaborasi, pembelajaran pengorganisasian awal, algoheuristik, pembelajaran inkuiri, dan pemaparan komponen. Metaanalisis atas teori-teori pembelajaran tersebut menurut Reigeluth dan Merrill berpijak pada kerangka teoretik seperti tampak dalam gambar berikut. Teori pembelajaran yang bersifat preskriptif menurut Reigeluth, secara umum dapat dirumuskan dengan pernyataan: Agar supaya hasil pembelajaran dapat dikuasai seperti yang diharapkan, dan dengan mempertimbangkan kondisi pembelajaran yang

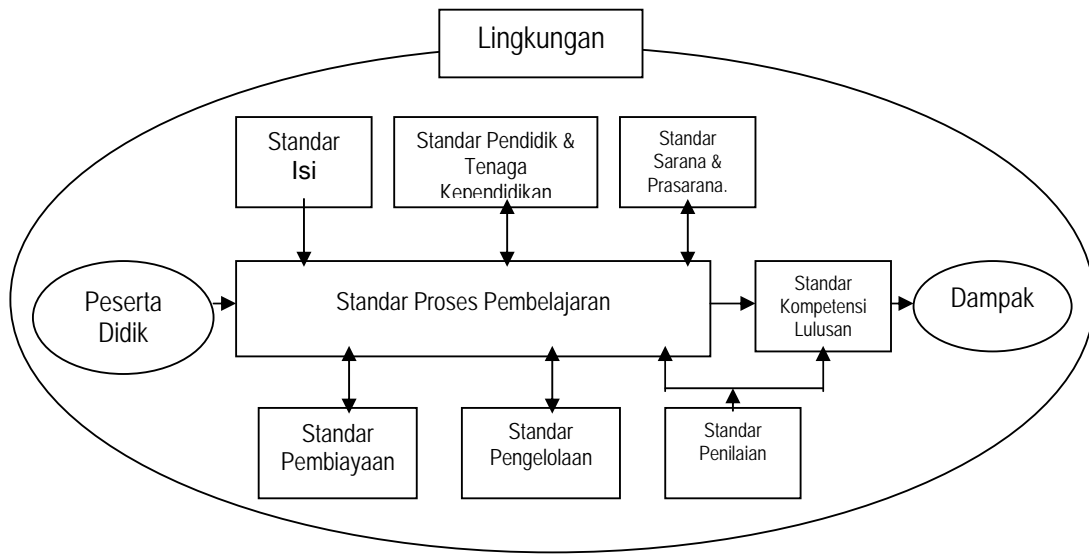
ada, maka perlu diberikan perlakuan pembelajaran tertentu. Terkait dengan itu, Novak dan Gowin (1986) memperkenalkan dua prinsip pembelajaran yakni dengan jaringan konsep dan pengetahuan diagram Vee yang dapat membantu siswa dan pendidik untuk melihat makna materi pembelajaran dan mendalami, memahami struktur dan makna pengetahuan.



Gambar 1. Kerangka Teori Pembelajaran (diadaptasi dari Reigeluth, 1993, p. 19)

Mengingat bahwa pendidikan itu merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan, maka keseluruhan sistem harus sesuai dengan ketentuan yang diharapkan atau sesuai standar. Untuk itu masing-masing komponen dalam sistem harus pula sesuai dengan standar yang ditentukan bersama. Sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam gambar sistem pembelajaran tersebut dapat dilihat arti penting proses pembelajaran. Karena betapa baiknya masukan berupa peserta didik, serta masukan instrumental berupa isi, tenaga, sarana dan prasarana, biaya dan pengelolaan, tergantung pada proses pembelajaran untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang bermutu, serta berdampak positif terhadap lingkungan.

Mutu pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik-buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Lembaga pendidikan dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga membuahkan hasil.



Gambar 2. Sistem Pembelajaran dan Keterkaitannya dengan Berbagai Standar Pendidikan yang sedang Dikembangkan di Indonesia

Berdasarkan berbagai pengkajian, konsep mutu pembelajaran dapat disimpulkan mengandung lima rujukan, yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran. Rujukan **kesesuaian** meliputi indikator sebagai berikut: sepadan dengan karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan sesuai dengan teori, prinsip, dan/atau nilai baru dalam pendidikan.

Pembelajaran yang bermutu juga harus mempunyai **daya tarik** yang kuat; indikatornya meliputi: kesempatan belajar yang tersebar dan karena itu mudah dicapai dan diikuti, isi pendidikan yang mudah dicerna karena telah diolah sedemikian rupa, kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan, pesan yang diberikan pada saat dan peristiwa yang tepat, keterandalan yang tinggi, terutama karena kinerja lembaga dan lulusannya yang menonjol, keanekaragaman sumber, baik yang dengan sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, dan suasana yang akrab, hangat, dan merangsang pembentukan kepribadian peserta didik.

Efektivitas pembelajaran seringkali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, atau “*doing the*

right things". Pengertian ini mengandung ciri: bersistem (sistematik), yaitu dilakukan secara teratur, konsisten atau berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar, kejelasan akan tujuan dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya, bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat dan pemerintah).

Efisiensi pembelajaran dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh atau dapat dikatakan sebagai mengerjakan sesuatu dengan benar. Ciri yang terkandung meliputi: merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan model yang mengacu pada kepentingan, kebutuhan dan kondisi peserta didik, pengorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang rapi, misalnya lingkungan atau latar belakang yang diperhatikan, pemanfaatan berbagai sumber daya dengan pembagian tugas seimbang, serta pengembangan dan pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan, pemanfaatan sumber belajar bersama, usaha inovatif yang merupakan penghematan, seperti misalnya pembelajaran jarak-jauh dan pembelajaran terbuka yang tidak mengharuskan pembangunan gedung dan mengangkat tenaga pendidik yang digaji secara tetap. Inti dari efisiensi adalah mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal (sistemik) untuk menyusun alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang paling menguntungkan.

Produktivitas pada dasarnya adalah keadaan atau proses yang memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak. Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti: perubahan proses pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan mencipta), penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar), peningkatan intensitas interaksi peserta didik dengan sumber belajar, atau gabungan ketiganya dalam kegiatan belajar-pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik, keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan berkurangnya angka putus sekolah.

3. Landasan Empirik

Proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu pendidikan. Berbagai masukan lain di antaranya kondisi peserta didik (kesehatan, kebugaran, dan lain-lain), kualitas

pendidik, kurikulum, terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana, dan sebagainya, merupakan faktor yang terkait erat dengan mutu. Kesemuanya itu memerlukan dukungan legalitas sebagai pedoman standar.

Pada awal PELITA I pemerintah telah mengambil kebijakan untuk digunakannya siaran radio dan televisi – sebagai upaya jalan pintas dalam meningkatkan mutu pendidikan secara cepat dan meluas. Namun kebijakan tersebut tidak dapat terwujud karena kurangnya komitmen. Pada tahun 1975 dilakukan pembaharuan kurikulum, yang antara lain mengharuskan para guru untuk merencanakan kegiatan mengajarnya dengan menggunakan model PPSI (prosedur pengembangan sistem instruksional) yang distandarkan untuk semua matapelajaran. Bukan semata-mata kesalahan guru kalau tidak dapat menerapkan standar tersebut, tetapi juga kesalahan konseptual yang menganggap bahwa satu model pembelajaran dapat berlaku bagi semua pelajaran.

Hingga saat ini proses pembelajaran belum dapat berlangsung secara efektif. Selama ini masih banyak digunakan paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dan belum banyak memberikan peran yang lebih besar kepada peserta didik. Kurikulum yang banyak digunakan, bahkan yang dikembangkan pada tahun 2004 untuk uji coba, masih bersifat sarat isi, dan karena itu menyiratkan agar peserta didik menghafalkan isi pelajaran. Hal ini berarti bahwa pembelajaran hanya mampu mencapai tujuan belajar tahap awal atau rendah, dan menghalangi terbentuknya kemampuan untuk memecahkan masalah dan mencipta. Penyajian pelajaran oleh guru kebanyakan bersifat verbal dan karena itu lebih banyak merangsang belahan otak kiri, sementara rangsangan terhadap belahan otak kanan dengan pendekatan visual, holistik dan kreatif kurang mendapat perhatian. Kegiatan belajar dan pembelajaran lebih banyak berfokus pada penguasaan atas isi buku teks. Semua hal ini telah menyebabkan belajar yang membosankan dan mematikan kreativitas peserta didik.

Usaha untuk mengembangkan model praktik pembelajaran seperti PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) di SD/MI atau Kontekstual di SMP/MTs memang telah dicanangkan sejak tahun 2002. Namun belum seluruhnya dapat diwujudkan, karena tidak disertai dengan dukungan legalitas dan belum didukung penataran secara komprehensif. Demikian pula berbagai pendekatan pembelajaran lain seperti misalnya pembelajaran kooperatif, pembelajaran beregu, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran dengan pemetaan konsep,

pembelajaran mandiri dengan modul dan paket belajar, pembelajaran berbantuan komputer, pembelajaran dengan menggunakan internet, dan pembelajaran dengan aneka sumber, sudah diperkenalkan namun masih bersifat sporadis dan kurang mendapat dukungan meluas dalam pelaksanaan di lapangan.

Pembaharuan proses pembelajaran telah dikembangkan pada sejumlah sekolah di sejumlah daerah yang dianggap merupakan titik-titik kritis untuk penyebarannya melalui proyek-proyek pembangunan. Di samping itu juga telah dikembangkan sekolah-sekolah unggulan pada sebagian besar daerah, sekolah koalisi yang menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah di dalam maupun luar negeri, sekolah-sekolah laboratorium yang dibina oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan sekolah-sekolah swasta yang mengarahkan lulusannya untuk memenuhi standar regional dan atau internasional. Semua usaha pembaharuan tersebut memang sudah dapat dikatakan melebihi standar minimal proses pembelajaran. Pelajaran dan pengalaman yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut perlu dikaji kemungkinannya untuk diimbaskan pada sekolah-sekolah lain, sesuai dengan kemampuannya.

Pembelajaran seharusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif dalam suasana yang menyenangkan, menggairahkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk semua itu, maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran yang berlaku secara nasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional serta memperoleh dukungan dari masyarakat.

C. Lingkup Standar Proses Pembelajaran

Mengacu pada PP No. 19 tahun 2005, standar proses pembelajaran yang sedang dikembangkan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Standar perencanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip sistematis dan sistemik. Sistematis berarti secara runtut, terarah dan terukur dari jenjang kemampuan rendah hingga tinggi secara berkesinambungan. Sistemik berarti

mempertimbangan berbagai faktor yang berkaitan, yaitu tujuan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, karakteristik peserta didik, karakteristik materi ajar yang mencakup fakta, konsep, prosedur, dan prinsip, kondisi lingkungan dan hal-hal lain yang menghambat atau mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Standar pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip intensitas interaksi antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik, dan antara peserta didik dengan aneka sumber belajar. Untuk itu perlu diperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap kelas, beban pembelajaran maksimal pendidik, dan ketersediaan buku teks pelajaran bagi peserta didik. Di samping itu perlu dipertimbangkan bahwa proses pembelajaran bukan sekedar menyampaikan ajaran, melainkan juga pembentukan pribadi peserta didik yang memerlukan perhatian penuh dari pendidik, maka juga perlu ditentukan tentang rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik. Perihal kemampuan pengelolaan kegiatan belajar dan pembelajaran pendidik, juga sesuatu yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Standar penilaian hasil pembelajaran ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Teknik yang dimaksud dapat berupa tes tertulis, observasi, uji praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta memperbaiki hasil belajar peserta didik dapat digunakan teknik penilaian portofolio dan atau kolokium. Secara umum penilaian dilakukan untuk mengukur semua aspek perkembangan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan mengacu dan sesuai dengan standar penilaian.

Standar pengawasan proses pembelajaran adalah upaya penjaminan mutu pembelajaran bagi terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien kearah tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dan kewenangan, dilakukan secara periodik, demokratis, terbuka, dan berkelanjutan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut. Upaya pengawasan terhadap proses pembelajaran pada hakikatnya adalah tanggung jawab bersama antara kepala sekolah,

pengawas, dan sejawat atau pihak lain yang ditugasi untuk melaksanakan pengawasan secara internal.

D. Mekanisme Pengembangan

Pengembangan standar proses dilakukan dalam serangkaian kegiatan yang diawali dengan pengangkatan Tim Ahli standar proses. Pertemuan awal Tim Ahli dengan pimpinan dan anggota BSNP menyepakati target dan agenda kegiatan, serta pembagian tugas. Para anggota Tim Ahli bertugas untuk merumuskan draft naskah akademik dan standar proses pembelajaran. Formulasi gagasan awal dari masing-masing anggota tim tersebut kemudian dibahas bersama dengan pimpinan dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan.

Hasil rumusan pembahasan gagasan awal tersebut kemudian didiskusikan untuk menyempurnakan draft awal, dan menjadi acuan penyempurnaan draft naskah standar proses yang disusun atau direvisi pada tahap berikutnya. Sampai akhir September 2006 telah dilakukan pertemuan Tim AdHoc sebanyak 7 kali dalam rangka menyempurnakan naskah tersebut. Draft naskah yang disusun, telah divalidasi oleh para guru di Kupang pada tanggal 9 Agustus 2006 dan divalidasi pula oleh para guru di sekitar Jabotabek dan para pakar serta para pemangku kepentingan pada tanggal 31 Agustus 2006 di Jakarta. Hasil proses validasi itu kemudian disempurnakan lagi pada tanggal 25-27 September 2006 oleh Tim AdHoc untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan uji publik. Diharapkan naskah standar proses pembelajaran akan terselesaikan dan siap menjadi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI pada akhir tahun 2006.

Daftar Rujukan

- Dewey, John. *Democracy in Education*. New York: The Macmillan Co., 1964.
- Heinich, Robert, Michael Molenda and Jame Russell. *Instructional Media and the New Technologies of Instruction*. New York: Macmillan Publishing Co., 1989.
- Novak, Joseph D. and D. Bob Gowin. *Learning How to Learn*. Melbourne: Cambridge University Press, 1986.
- Ornstein, Allan C. and Daniel U. Levie. *Foundations of Education*. Boston: MA, 1981.
- Reigeluth, Charles M. (ed). *Instructional Theories in Action*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1987.
- _____. *Instructional Design Theories and Models*. Vol. I. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1993.
- Seels, Barbara B. and Rita C. Richey. *Instructional Technology: the definition and domains of the field*. Washington DC: AECT, 1994.
- Thompson, M.M. *The History of Education*. New York: Barnes and Noble, Inc., 1962.
- Tilaar, H.A.R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002.